

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2012-2016**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

SEPTYA DWIANA ADISTYARI

NIM : 2014310647

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH


Nama : Septya Dwiana Adistyari
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 05 September 1995
N.I.M : 2014310647
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016

Disetujui dan diterima baik oleh :

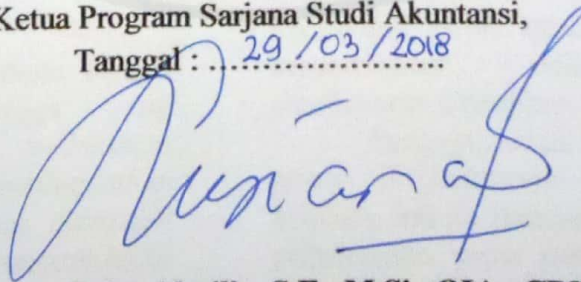
Dosen Pembimbing,
Tanggal : 29/03/18


(Diyah Pujiati, S.E., M.Si)

Co. Dosen Pembimbing,
Tanggal : 29/03/2018


(Nur'aini Rokhmania, S.E., Ak., M.Ak)

Ketua Program Sarjana Studi Akuntansi,
Tanggal : 29/03/2018


(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK)

**THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE ON THE
TAX AVOIDANCE OF MINING COMPANIES
LISTED IN BEI YEAR OF 2012-2016**

Septya Dwiana Adistyari

STIE Perbanas Surabaya

Email :septyada@gmail.com

Jl. Wonorejo Permai Utara III No. 16 Rungkut, Surabaya 60296, Indonesia

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Corporate Governance to the Tax Avoidance on mining companies that are listed in Indonesian Stock Exchange period of 2012-2016. Corporate Governance in this study is proxied by institutional ownership, board of independent commissioners, audit committee, and audit quality. Tax Avoidance in this study was measured by the size of Cash Effective Tax Rate (CETR). Sampling technique in this study was using purposive sampling technique. There is 90 samples which in use for this study from the total sample. This study was tested using multiple linear regression analysis. Data were analyzed using SPSS software 23 version. The results of this study showed that audit quality have effect to the Tax Avoidance, while other variables; institutional ownership, board of independent commissioners, and audit committee do not significant effect to the Tax Avoidance. This study still have many shortcomings, so it is hoped for the next researcher to add other variables that may have an effect on the Tax Avoidance.

Key word: *Tax Avoidance, Institutional Ownership, Board of Independent Commissioners, Audit Committee, and Audit Quality.*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara yang utama sangat didukung oleh sektor pajak yang mendominasi dalam melakukan pembangunan nasional serta meningkatkan stabilitas negara. Hal ini juga didukung oleh APBN 2017 yang menunjukkan bahwa target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.498,9 triliun. Jumlah ini sebesar 85,6% dari total pendapatan negara

keseluruhan (APBN, 2017). Oleh karena itu, wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya.

Pengoptimalan dalam pemungutan pajak di Indonesia masih mengalami kendala, hal ini mengakibatkan efektivitas pemungutan pajak mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2016 yang dapat dibuktikan dengan penerimaan sektor pajak yang seharusnya dapat diterima oleh

negara tidak sebesar realisasi penerimaan pajaknya. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang menekan kewajiban pajaknya yang harusnya dibayarkan, dengan melakukan penghindaran pajak. Selain itu, sistem pemungutan pajak *self assessment* juga mengindikasikan banyaknya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. *Tax Avoidance* merupakan usaha dalam meminimalkan kewajiban pajak dengan cara yang legal.

Perusahaan pertambangan menjadi sorotan paling penting karena perusahaan sektor ini merupakan penyumbang pajak terbesar, selain itu banyaknya tindakan WP yang melakukan *Tax Avoidance*, dan pada sektor ini cukup bermasalah. Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah, adanya kenaikan aliran uang ilegal dari tahun 2003 hingga 2014 pada sektor pertambangan. Diindikasikan bahwa hal ini timbul karena adanya transaksi perdagangan faktur palsu oleh tambang-tambang ilegal, adanya ekspor komoditi yang tidak tercatat, selain itu tingginya penghindaran pajak yang dilakukan oleh sektor ini. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang hanya sebesar 9,4% (PWYP, 2015). Hal inilah yang memberikan sinyal adanya tindakan *Tax Avoidance*.

Fenomena yang terjadi terkait dengan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan pertambangan sangatlah rumit. Seperti yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa perusahaan tambang di Indonesia milik Grup Bakrie telah melakukan *Tax Avoidance* sebesar Rp2.176 triliun, dimana paling besar dilakukan oleh PT. Kaltim Prima Coal sebesar Rp1,5 triliun dan sisanya dilakukan oleh anak perusahaannya yang lain (David, 2014). KPC ini melakukan penghindaran pajaknya dengan cara membelokkan penjualannya ke PT Indocoal Resource Limited anak perusahaan BUMI di Kepulauan Cayman.

Tax Avoidance sendiri merupakan kasus yang rumit karena disatu sisi hal tersebut diperbolehkan karena tidak melanggar Undang-Undang, tetapi disatu sisi hal tersebut tidak diperkenankan oleh negara karena dapat menurunkan penerimaan negara dan mengganggu stabilitas negara. *Tax Avoidance* memicu timbulnya konflik *Agency*. Salah satu mekanisme dalam mengontrol konflik *Agency* adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*). *Corporate Governance* bertujuan untuk terciptanya tata kelola yang baik, efisien, serta efektif dan tetap patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada penelitian ini *Corporate Governance* diprosikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Dy Retta dan Mienati (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti dan Ketut Alit (2014) serta Kholbadalov (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pada proksi dewan komisaris independen, penelitian terdahulu menyatakan hasil yang berbeda-beda. Menurut I Gusti dan Ketut Alit (2014) serta Kesit (2014) menemukan bukti adanya pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan pada penelitian Dyah Hayu dan Supriyadi (2015) dan Ida Ayu dan Ketut (2016) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut Kesit (2014) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian dari Ida Ayu dan Ketut (2016), yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Pada kualitas audit terhadap *Tax Avoidance* juga menunjukkan hasil

yang berbeda. Fitri dan Tridahas (2015) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun, berbedaa dengan I Gusti dan Ketut (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Perbedaan hasil yang beragam serta adanya fenomena-fenomena yang mendukung, memotivasi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh dari *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Terdapat hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*), bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Hubungan dalam keagenan mengakibatkan permasalahan yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi, serta menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena perbedaan tujuan antara manajemen dengan kepentingan pemilik. Selain itu juga menyebabkan timbulnya biaya keagenan. Biaya keagenan ini antara lain : (1) biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh *principal*, (2) biaya mengikat yang dikeluarkan oleh *agent*, dan (3) kerugian sebagai pengurang kekayaan *principal* atau pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Cara untuk menurunkan biaya keagenan serta menyelesaikan konflik kepentingan tersebut dengan cara tetap menjaga dan memaksimalkan nilai perusahaan dan dengan meminimalisir kewajiban pajak perusahaan melalui praktik *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance

Tax Avoidance yang dilakukan disini, yaitu dengan mengurangi jumlah pajak dengan cara tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. Dyreng, et al., (2010) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan pengurangan kewajiban pajak perusahaan. *Tax Avoidance* sendiri dapat dilakukan dengan cara memperkecil objek pajak yang dikenakan sehingga tarif beban pajak lebih kecil dari yang sebenarnya. Hal ini menjadikan beban pajak menjadi lebih rendah.

Corporate Governance

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja suatu perusahaan. *Corporate Governance Indonesia* menyebutkan bahwa terdapat manfaat dari *Corporate Governance*, antara lain (1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik serta dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, (2) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan saham di Indonesia, (3) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Kepemilikan Institusioanl

Salah satu bentuk mekanisme monitoring eksternal adalah kepemilikan institusional (Sabar Warsini, 2016). Kepemilikan institusional berperan dalam meminimalkan konflik kepentingan dalam perusahaan. Kepemilikan institusional juga mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen karena didalamnya investor institusional berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola perusahaan.

Dewan Komisaris Independen

UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis lainnya

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI), mewajibkan perusahaan yang tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris. Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses *Corporate Governance*.

Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, dapat membantu perusahaan untuk patuh terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Serta dapat memberikan kontrol yang efektif dan efisien terhadap benturan kepentingan dalam perusahaan.

Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *Corporate Governance* adalah kualitas audit yang erat kaitannya dengan prinsip akuntansi yaitu transparansi. Dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa sekaligus untuk dapat memenuhi kualitas audit, seorang auditor harus berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Pengaruh ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dy Retta dan Mienati (2016) yang menyatakan bahwa, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini disebabkan karena baik besar ataupun kecilnya suatu persentase kepemilikan saham, dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. Dalam peranannya,

kepemilikan institusional memiliki mekanisme yang penting dalam mendisiplinkan, memantau, serta mempengaruhi keputusan dari pihak manajemen sehingga dapat meminimalkan tindakan *Tax Avoidance*.

Menurut Sabar Warsini (2016) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Putu Rista dan IGK Agung (2016) yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara dewan komisaris independen dengan *Tax Avoidance*. Ini berarti bahwa keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Menurut Kesit Bambang (2014) menyatakan bahwa komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan. Secara aktif, komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta dapat mengurangi resiko seperti, rendahnya kepercayaan investor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance* memiliki pengaruh yang besar pada perusahaan.

H₂ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab dalam mengawasi audit eksternal perusahaan dan juga

berperan dalam memonitoring penyusunan laporan keuangan perusahaan. Tentunya dengan melakukan pengawasan ini dapat mencegah pihak manajemen dalam melakukan kecurangan. Keberadaan komite audit yang besar dalam perusahaan mampu mewujudkan kualitas dari *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Putu Rista dan IGK Agung (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Trisna dan Ketut Alit (2016) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*.

Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan maka akan meningkatkan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam perusahaan. Sehingga akan meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

H₃ : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

I Gusti Ayu dan Ketut Alit (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas audit terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Hal ini dinyatakan dengan, apabila suatu perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four*, maka akan semakin sulit dalam melaksanakan tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Tentunya KAP *The Big Four* memiliki pengetahuan dalam pendeteksian yang maksimal, serta pengetahuan dalam memeriksa laporan keuangan serta seluruh kegiatan dalam perusahaan. Dengan kapabilitas dan

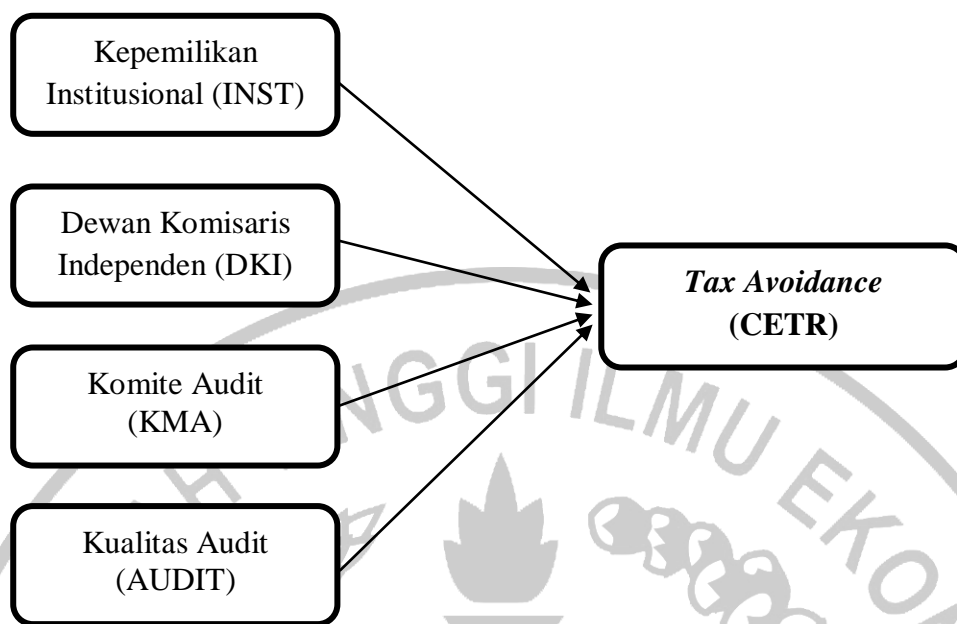
independensi yang dimiliki oleh auditor, maka auditor yang berkualitas akan mampu menemukan kecurangan dan mampu mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Sabar Warsini (2016) menyatakan bahwa auditor yang berkualitas tidak mengendaki manajemen perusahaan kliennya dalam melakukan tindakan penghindaran pajak karena jika auditor menghendaki tentunya akan muncul berbagai risiko. Semakin tingginya tingkat independensi auditor maka akan meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, dengan meningkatnya kredibilitas dari laporan keuangan maka diharapkan akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Pengaruh tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kualitas audit yang baik dalam perusahaan akan mampu dalam membatasi manajemen perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

H₄ : Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian-uraian hubungan antar variabel tersebut, maka terbentuklah kerangka pikir teoritis yang menggambarkan penelitian yang diteliti dan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode dalam pengumpulan *sampling* dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian antara lain :

1. Merupakan perusahaan sektor pertambangan.
2. Perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan, serta laporan tahunan auditan selama tahun 2012-2016 dan dapat diakses dari situs BEI (www.idx.co.id), dari saham ok (www.sahamok.com), maupun dari website resmi perusahaan.
3. Laporan keuangan serta laporan tahunan auditan tersebut berakhir pada 31 Desember 2016.

4. Perusahaan sektor pertambangan yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian tahun 2012-2016.
5. Laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan auditan memiliki data yang dibutuhkan selama lima tahun penelitian, yaitu 2012-2016.

Terdapat sebanyak 118 sampel data yang didapatkan peneliti. Setelah dilakukan outlier data, diperoleh hasil sebanyak 90 sampel data yang digunakan dalam penelitian ini, dan akan diuji menggunakan SPSS 23 *version*.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam pengumpulan data menggunakan metode arsip, dengan cara memanfaatkan laporan keuangan serta laporan tahunan auditan perusahaan pertambangan periode 2012-2016 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, variabel

dependen yaitu *Tax Avoidance*, variabel independen yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Definisi Operasional Variabel

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mengurangi beban pajak perusahaan secara legal dan masih dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang ada. *Tax Avoidance* diukur dengan menggunakan CETR. Penggunaan CETR ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang (2014), Putu Rista dan IGK Agung (2016), serta Fitri dan Tridahu (2015).

Cash Effective Tax Rate disini merupakan kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyrenge, et al., 2010). *Cash Effective Tax Rate* baik digunakan karena tidak terpengaruh adanya perubahan estimasi seperti penyisihan nilai atau perlindungan pajak sehingga hal tersebut menjadikan CETR sebagai pengukuran yang baik dalam mengetahui tingkat *Tax Avoidance* dalam perusahaan. *Tax Avoidance* diukur dengan:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak Yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka akan semakin rendah pula konflik keagenan yang muncul sehingga dapat menekan pihak manajemen untuk tidak melakukan tindakan *Tax Avoidance*. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional dilambangkan dengan INST. Menurut Desai dan

Dharmapala (2006), kepemilikan institusional diukur dengan :

$$\text{INST} = \frac{\sum \text{Saham Milik Institusi}}{\sum \text{Saham Yang Beredar}}$$

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain yang bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris independen dapat dilambangkan dengan DKI. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dyah Hayu dan Supriyadi (2015), dewan komisaris independen dapat diukur dengan :

$$\text{DKI} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

Komite Audit

Komite audit merupakan komite tambahan yang memiliki tujuan untuk melakukan monitoring dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan agar terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Putu dan IGK Agung, 2016). Adanya komite audit dalam suatu perusahaan akan mampu dalam memberikan pengawasan langsung kepada manajemen perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini dilambangkan dengan KMA, serta dapat diukur dengan :

$$\text{KMA} = \frac{\sum \text{Komite Audit Dari Luar}}{\sum \text{Seluruh Anggota Komite Audit}}$$

Kualitas Audit

Kualitas audit didefinisikan sebagai persepsi para pengguna laporan keuangan yang telah diaudit, tentang KAP yang mengaudit laporan keuangan tersebut.

Kualitas audit biasanya diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran KAP yang mengaudit suatu perusahaan. Dalam praktiknya, jika perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four*, maka akan semakin sulit dalam melakukan praktik *tax avoidance* (I Gusti dan Ketut, 2014).

Maka dalam pengukurannya apabila diaudit oleh KAP *The Big Four* (variabel dummy) akan diberikan angka 1 dan bagi yang diaudit oleh KAP *Non-The Big Four* maka akan diberikan angka 0. Dalam penelitian ini, kualitas audit dilambangkan dengan AUDIT.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji regresi linear berganda (uji F, uji R², dan uji t). Uji tersebut dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 23. Persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1\text{INST} + \beta_2\text{DKI} + \beta_3\text{KMA} + \beta_4\text{AUDIT} + \varepsilon$$

Keterangan :

- CETR : *Cash Effective Tax Rate*
- INST : Kepemilikan Institusional
- DKI : Dewan Kom. Independen
- KMA : Komite Audit
- AUDIT : Kualitas Audit
- α : Konstanta Persamaan
- $\beta_1, 2, 3, 4$: Koefisien Regresi
- ε : Standar Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dari segi minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), serta standar deviasi. Dari keseluruhan data sampel yang digunakan,

90 sampel dengan gambaran distribusi data dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

CETR (<i>Tax Avoidance</i>)				
N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
90	0,01416	0,73955	0,37143	0,17221
INST (Kepemilikan Institusional)				
N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
90	0,07226	0,97014	0,60087	0,25799
DKI (Dewan Komisaris Independen)				
N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
90	0,25000	0,66667	0,40062	0,10633
KMA (Komite Audit)				
N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
90	0,00000	1,00000	0,60018	0,14737

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Pada tabel tersebut terlihat bahwa variabel CETR memiliki nilai minimum sebesar 0,01416 dan nilai maksimum sebesar 0,73955 serta mean sebesar 0,37143. Berdasarkan nilai standar deviasi sebesar 0,17221 menjelaskan bahwa jarak antara data satu dengan data yang lain adalah sebesar 0,17221. Perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,37143572. Berdasarkan tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai standar deviasi yang rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa standar error pada variabel tersebut rendah. PT. Adaro Energy Tbk memiliki nilai CETR tertinggi yaitu sebesar 0,73955 atau sebesar 73,95 % pada tahun 2015. Nilai CETR terendah dimiliki oleh PT. Bara Jaya International Tbk pada tahun 2014, yaitu sebesar 0,01416 atau sebesar 1,41 %.

Hasil statistik deskriptif selanjutnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,60087 dan standar deviasi sebesar 0,25799. Nilai rata-rata sebesar 0,60087 atau sebesar 60,08 % menunjukkan bahwa saham yang beredar dalam perusahaan dimiliki oleh pihak institusional sedangkan sisanya dimiliki oleh para internal perusahaan ataupun publik. Pada standar deviasi, dapat diartikan bahwa rentang antara data satu dengan data yang lainnya adalah sebesar 0,25799. Nilai standar deviasi yang terbilang rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa variasi kepemilikan institusional dinilai rendah. Nilai maksimum INST yang sebesar 0,97014 atau sebesar 97,01% dimiliki oleh PT. Dian Swastika Sentosa Tbk tahun 2014. Sedangkan nilai INST terendah dimiliki oleh PT. Mitra Investindo Tbk tahun 2014 yaitu sebesar 0,072267 atau sebesar 7,22%.

Pada DKI menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang belum menyesuaikan ketentuan BEI, yaitu memiliki sekurang-kurangnya 30% dari jumlah dewan komisaris. Diketahui nilai minimum komisaris independen tersebut adalah 0,25000 atau setara dengan 25%, hal ini menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang belum menerapkan ketentuan BEI. Nilai minimum tersebut dimiliki oleh PT. Surya Esa Perkasa Tbk tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan dimiliki juga oleh PT. Petrosea Tbk tahun 2014. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,66667 atau 66,67% dimiliki oleh PT. Apexindo Pratama Duta Tbk tahun observasi 2012, 2013, dan 2015, selain itu dimiliki juga oleh PT. Toba Bara Sejahtera Tbk tahun observasi 2013 hingga tahun 2016, serta dimiliki oleh PT. Delta Dunia Makmur Tbk tahun 2014. Nilai rata-rata sebesar 0,40062 atau sebesar 40,06% dapat diindikasikan bahwa rata-rata sampel sudah memenuhi syarat minimal dari peraturan yang telah ditetapkan sebesar 30%.

Statistik deskriptif komite audit (KMA) dapat diketahui bahwa selama periode pengamatan pada perusahaan pertambangan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,60018 atau setara dengan 60,02% serta nilai standar deviasi sebesar 0,14737 atau sebesar 14,73%. Nilai *mean* tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata sampel telah memenuhi batas minimal sebesar 30% dari peraturan yang telah ditetapkan. Nilai KMA terendah adalah sebesar 0 dimiliki oleh PT. Baramulti Suksessarana Tbk tahun 2012. Hal ini dikarenakan PT. Baramulti Suksessarana Tbk pada tahun tersebut masih akan membentuk komite audit. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1,00000 dimiliki oleh PT. Baramulti Suksessarana Tbk tahun 2014.

Tabel 2
Ringkasan Kap Yang Digunakan
Perusahaan

AUDIT (Kualitas Audit)		
Keterangan	Frequency	Percent
KAP <i>Non The Big Four</i>	33	36,7
KAP <i>The Big Four</i>	57	63,3
Total	90	100%

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah sampel perusahaan yang menggunakan jasa KAP *The Big Four* (variabel dummy 1) adalah berjumlah 57 sampel atau sebesar 63,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa dari keseluruhan sampel perusahaan pertambangan, sebesar 63,3% memakai jasa KAP *The Big Four* dalam memeriksa laporan keuangannya. Sedangkan pada sampel yang menggunakan jasa KAP *Non The Big Four* (variabel dummy 0) adalah berjumlah 33 sampel dengan persentase sebesar 36,7%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebesar 36,7% dari keseluruhan sampel perusahaan

pertambahan menggunakan jasa KAP *Non The Big Four*.

Tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan pertambahan rata-rata memiliki kualitas audit yang baik, karena jumlah KAP *The Big Four* dalam memeriksa laporan keuangan lebih besar dibandingkan dengan jumlah KAP *Non The Big Four*. Dengan menggunakan jasa KAP *The Big Four* perusahaan pertambahan akan cenderung menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat menampilkan nilai yang sebenarnya, sehingga hal tersebut akan meminimalisir pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (*KS test*), dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (Sesudah Outlier)

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
N	90
<i>Test Statistic</i>	0,080
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber : Output SPSS, data diolah

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan *Run Test*. Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa signifikansi sebesar 0,289. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa persamaan regresi

terbebas dari adanya autokorelasi karena nilainya yang lebih dari 0,05.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi Run Test

<i>Run Test</i>	
	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Total Cases</i>	90
<i>Test Value</i>	-0,02203
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,289

Sumber : Output SPSS, data diolah

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang diteliti memiliki nilai VIF yang kecil yaitu < 10 . Selain itu nilai *tolerance* juga menunjukkan bahwa pada penelitian ini nilai *tolerance* $> 0,10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ada variabel independen yang menunjukkan adanya gejala multikolinearitas atau dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Multikolinearitas	
	<i>Collinearity Statistics</i>	
	Tolerance	VIF
INST	0,887	1,127
DKI	0,907	1,102
KMA	0,986	1,014
AUDIT	0,960	1,042

Sumber : Output SPSS, data diolah

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka digunakan uji Glejser. Nilai signifikansi variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi yang besar yaitu lebih dari 0,05. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain INST 0,087, DKI 0,496, KMA 0,547, dan AUDIT 0,727 tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen RES2. Tingkat signifikansi yang diatas 0,05 menunjukkan bahwa dalam model regresi terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Heteroskedastisitas	
Model	Sig.
Kepemilikan Institusional	0,087
Dewan Komisaris Independen	0,496
Komite Audit	0,547
Kualitas Audit	0,727

a. Dependent Variable : RES2
Sumber : Output SPSS, data diolah

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penggunaan teknik ini dipilih karena dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Setelah dilakukan pengujian, maka terbentuklah persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{CETR} = 0,235 + (0,086)\text{INST} + (0,010)\text{DKI} + 0,215\text{KMA} + 0,100\text{AUDIT} + \varepsilon$$

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

<i>Multiple Linear Regression Test</i>		
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	
	B	Std. Error
Kepemilikan Institusional	-0,086	0,072
Dewan Komisaris Independen	-0,010	0,173
Komite Audit	0,215	0,120
Kualitas Audit	0,100	0,037
(Constant)	0,235	0,110

a. Dependent Variable : CETR
Sumber : Output SPSS, data diolah

Persamaan regresi yang terbentuk di atas dapat dipaparkan sebagai berikut ini :

- Variabel independen AUDIT dianggap konstan, maka nilai CETR (tingkat *Tax Avoidance*) sebesar 0,235 atau sebesar 23,5%.
- Koefisien regresi INST sebesar -0,086 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan nilai dari Kepemilikan Institusional (INST) serta menganggap variabel lainnya tetap, maka CETR akan mengalami penurunan sebesar -0,086.
- Koefisien regresi DKI sebesar -0,010 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan nilai dari Dewan Komisaris Independen dan menganggap variabel lainnya tetap, maka CETR akan mengalami penurunan sebesar -0,010.
- Koefisien regresi KMA sebesar 0,215 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan nilai dari Komite Audit dan menganggap bahwa variabel lainnya tetap, maka CETR akan mengalami kenaikan sebesar 0,215.
- Koefisien regresi AUDIT sebesar 0,100. Variabel dummy pada Kualitas Audit (AUDIT) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan CETR antara

kualitas audit pada KAP *The Big Four* dan KAP *Non The Big Four*. Tanda positif menunjukkan bahwa ketika KAP *The Big Four* yang mengaudit perusahaan tersebut, maka CETR mengalami kenaikan.

Uji Kelayakan Model
Uji F

Tabel 8
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a		
Model	F _{hitung}	Sig.
Regression	2,803	0,031 ^b

Sumber : Output SPSS, data diolah

Nilai signifikansi pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai α yang sebesar 0,05 sehingga menyebabkan H0 ditolak, hal ini dapat diindikasikan bahwa regresi dalam penelitian ini fit ($0,031 < 0,05$). Hasil uji F dikatakan fit berarti bahwa terdapat salah satu variabel independen diantara INST, DKI, KMA, dan AUDIT berpengaruh terhadap variabel dependen *Tax Avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b			
Model	R	Adjusted R ²	Std. Error of the Estimate
1	0,341 ^a	0,075	0,165631845

Sumber : Output SPSS, data diolah

Pada tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,075 atau sebesar 7,5%. Hal ini menggambarkan bahwa proporsi variabel dependen *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu

kepemilikan institusional (INST), dewan komisaris independen (DKI), komite audit (KMA), dan kualitas audit (AUDIT). Sedangkan sisanya sebesar 92,5% dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian.

Uji t (Uji Signifikansi Individual)

Uji t merupakan alat untuk menguji apakah secara parsial variabel independen dalam persamaan regresi secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau dapat diartikan bahwa koefisien regresi signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Tabel 10
Hasil Uji Statistik T

Coefficienst ^a		
Model	t _{hitung}	Sig.
Kepemilikan Institusional	-1,192	0,236
Dewan Komisaris Independen	-0,059	0,953
Komite Audit	1,788	0,077
Kualitas Audit	2,699	0,008

Sumber : Output SPSS, data diolah

Berdasarkan uji t pada tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa variabel kualitas audit (AUDIT) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,008. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (CETR). Sedangkan variabel independen lainnya memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, yaitu kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,236, dewan komisaris independen (DKI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,953, serta komite audit (KMA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,077. Hal ini menunjukkan bahwa variabel INST, DKI,

dan KMA tidak berpengaruh terhadap CETR.

Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh hasil dan dapat dipaparkan sebagai berikut :

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional dalam perusahaan berfungsi untuk melaksanakan pengendalian oleh pihak luar pada perusahaan untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen. Kepemilikan institusional yang tinggi dalam suatu perusahaan akan cenderung melakukan pelaporan keuangan yang baik, sehingga dengan adanya kepemilikan institusional tersebut maka penghindaran pajak perusahaan akan semakin berkurang. Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Besar kecilnya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tidak membuat praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan dapat dihindari. Di samping itu, struktur kepemilikan institusional ternyata masih belum mampu dalam melakukan monitoring terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari Fitri dan Tridahus Susanto (2015), I Gusti Ayu dan Ketut Alit (2014) serta Kholbadalov (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Dy Retta M. dan Mienati (2016), serta Sabar Warsini (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris independen ini adalah bagian dari *Good Corporate Governance* yang berfungsi dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Beberapa alasan yang dapat mengindikasikan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yaitu, proporsi komisaris independen banyak ataupun sedikit dalam suatu perusahaan tidak menjamin dewan komisaris independen untuk meminimalisir adanya *Tax Avoidance*. Dengan adanya dewan komisaris independen tidak efektif dalam pencegahan *Tax Avoidance*. Keindependensian dari dewan komisaris independen belum menunjukkan hasil maksimal sehingga *monitoring* dan pemberian kebijakan masih belum berjalan dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Putu Rista dan IGK Agung (2016) dan Kesit Bambang (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Dy Retta M. dan Mienati (2016) serta Dyah Hayu dan Supriyadi (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit berfungsi dalam membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam memastikan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, pengendalian internal dilaksanakan dengan baik, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pengujian hipotesis menghasilkan kesimpulan bahwa

komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa banyaknya komite audit yang berasal dari luar tidak mempengaruhi *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

Tidak berpengaruhnya komite audit ini disebabkan oleh peran komite audit dalam pengambilan keputusan yang tidak terlalu besar dan juga terbatasnya kemampuan komite audit dalam melakukan pengawasan dan monitoring perusahaan sehingga praktik penghindaran pajak yang dilakukan pihak manajemen perusahaan tidak mampu terdeteksi oleh komite audit. Banyak ataupun sedikitnya komite audit dalam suatu perusahaan tidak menjamin perusahaan tersebut untuk terlepas dari praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri D. dan Tridahu S. (2015) dan penelitian dari Kesit Bambang (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu dan Ketut Alit (2016) serta Putu Rista dan IGK Agung (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Keindependensian dan profesionalitas seorang auditor sangat mempengaruhi kualitas audit yang akan dihasilkan bagi perusahaan yang diaudit. Melihat hasil pengujian hipotesis pada kualitas audit, diperoleh hasil bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hipotesis keempat penelitian, yaitu kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berpengaruhnya kualitas audit terhadap praktik *Tax Avoidance* menandakan bahwa KAP *The Big*

Four memiliki kualitas audit yang baik, sehingga perusahaan akan memiliki transparansi dalam melaporkan laporan keuangannya dan akan mampu membatasi kemungkinan pihak manajemen dalam melakukan praktik *Tax Avoidance*. Auditor eksternal yang berkualitas tidak akan menghendaki kebijakan kliennya untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga transparansi dalam laporan keuangan perusahaan sangatlah diperlukan untuk menghindari timbulnya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sabar Warsini (2016) dan I Gusti dan Ketut Alit (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Tridahu (2015) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Keterbatasan yang terbentuk dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kondisi *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan hanya menggunakan satu ukuran, yaitu dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*), selain itu berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan hanya sebesar 7,5% terhadap variabel dependennya. Dan

sisanya sebesar 92,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model dalam penelitian ini.

Saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya adalah :

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan ukuran lain untuk memprediksi adanya *Tax Avoidance*. Selain itu juga dapat menggunakan lebih dari satu pengukuran dalam memprediksi adanya *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan.

2. Pada penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan dalam menggunakan variabel lain yang mungkin memiliki potensi berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance*. Variabel independen lain yang mungkin berpengaruh, seperti ROA atau risiko perusahaan.

DAFTAR RUJUKAN

- David Dwiarto. 2014. Pajak Perusahaan Pertambangan. Indonesian Mining Association, (Online). (www.ima-api.com)
- Desai, M.A. & Dharmapala. 2006. "Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives". *Journal of Financial Economics*. Vol. 79. Pp 145-179
- Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi. 2015. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak". *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Medan
- Dy Retta Merslythalia dan Mienati Somya Lasmana. 2016. "Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 11, No. 02. Juli 2016. Pp 116-123
- Dyreg, Scott D., M. Hanlon, and Edward L. Maydew. 2010. "The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*. Vol. 85, No. 04. 2010. Pp 1163-1189
- Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto. 2015. "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance". *ESENSI Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5, No. 2. Oktober (2015). Pp 187-206
- Hanlon, Michelle., and Heitzman, Shane. 2010. "A Review of Tax Research". *Journal of Accounting and Economics*. 50 (2010). Pp 127-178
- Ida Ayu Trisna Yudi Asri dan Ketut Alit Suardana. 2016. "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 16, No. 01. Juli (2016). Pp 72-100
- I Gusti Ayu C. M. dan Ketut Alit Suardana. 2014. "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur". *E-Jurnal*

Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 09, No. 02. Pp 525-539

Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 16, No. 01. Juli 2016. Pp 702-732

Imam Ghozali. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS". Semarang. Universitas Diponegoro : Semarang

Sabar Warsini. 2016. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, dan Praktik CG Negara Dalam Tax Avoidance". *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung

Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol 3, No. 04

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBN. 2017

Kesit Bambang Prakosa. 2014. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia". *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram

Kholbadlov, Utkir. 2012. "The Relationship of Corporate Tax Avoidance, Cost of Debt and Institutional Ownership : Evidence from Malaysia". *Atlantic Review of Economics*.

Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. "Metode Penelitian Pendidikan". Bandung. Rosdakarya

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Oktober 2015

Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance". *E-*